



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DOORTJE SORTA SUSANI MARPAUNG
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 100980

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.223.366.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 677.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 174.675.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 82.095.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 535.896.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 472 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 892.400.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 660.240.000
7. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/160 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 314.744.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 435.716.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 44.000.000



1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 285.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.237.657.993

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.790.023.993

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.790.023.993

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.